



# REFORMASI PENDIDIKAN MENUJU INDONESIA BARU

**Khoirunnisaa'**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun  
(Email: ns\_khoir@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

*The existing education in Indonesia still has relevance to the history of Indonesian education development. Even the existence of educational reform is a historical demand with the meaning that the history of Indonesia's education had experienced the golden age, with the spirit of nationalism, patriotism and so on. Therefore, education to new Indonesia requires actions that can bring about changes by reviewing the education system by: 1). Internal change is to restore full educational functions or restoring pedagogical autonomy to schools and teachers. 2). External change is to make the education system an integral part of economic reform, politics, law and other reforms that will occur in society.*

Kata Kunci: *Pendidikan, reformasi, perubahan.*

## **A. Pendahuluan**

Keberhasilan pendidikan bukan saja dapat diketahui dari mutu individu warga negara, melainkan juga sangat terkait erat dengan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu pemikiran tentang pendidikan untuk masa depan bangsa dan masyarakat Indonesia perlu dimulai dengan telaah perkembangan bangsa ini sampai dengan masa terjadinya krisis menjelang tahun 2000 yang sampai sekarang belum sepenuhnya dapat teratasi.

Namun para pakar pendidikan tak henti-hentinya berusaha untuk membuat suatu perencanaan pendidikan yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Untuk membuat suatu perencanaan memang tidak mudah, harus melihat faktor-faktor yang mendukungnya. Pendidikan yang ada di Indonesia masih ada relevansinya dengan sejarah perkembangan pendidikan Indonesia. Bahkan adanya reformasi pendidikan itu merupakan sebuah tuntutan sejarah dengan artian bahwa sejarah pendidikan Indonesia dahulu pernah mengalami zaman keemasan, dengan jiwa nasionalisme, patriotisme dan lain sebagainya.

Dengan demikian berdasarkan paparan diatas maka dapat terumuskan beberapa permasalahan di antaranya; bagaimana sejarah pendidikan Indonesia dari zaman ke zaman, hal-hal apa sajakah yang mempengaruhi reformasi pendidikan serta apa yang dimaksud dengan reformasi pendidikan. Dalam rangka mencari jalan keluar tersebut, maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sejarah pendidikan Indonesia hubungannya dengan munculnya reformasi pendidikan. Uraian tersebut akan penulis jabarkan berikut ini.

## **B. Sejarah Pendidikan Indonesia**

Sejarah pendidikan yang ada di Indonesia memiliki beberapa era atau zaman yang masing-masing zaman itu memiliki karakteristik sesuai faktor kondisi yang mempengaruhi ketika itu. Adapun era – era itu diantaranya adalah:

### **1. Era Kerajaan Lokal**

Karakteristik dari zaman<sup>1</sup> ini adalah semua pihak, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, untuk menjadi patriotik yang membela kebenaran dan kebebasan terhadap penjajahan. Raja dan pangeran yang mempunyai komitmen tersebut dipatuhi oleh rakyatnya untuk melawan penjajah. Sebaliknya, rakyat melawan rajanya sendiri yang meninggalkan komitmen tersebut. Para kiai yang memiliki komitmen tersebut dipatuhi juga oleh para santri dan pengikutnya untuk melawan penjajah.

Pada era kerajaan lokal ini, membutuhkan manusia yang berjiwa pejuang untuk membela tanah airnya, sehingga baik raja dan rakyat maupun

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman*, (Jakarta: Balai Pustaka 1986), hlm. 77

kyai dan santri yang memiliki semangat juang tinggi bersama-sama menggalang kekuatan dan berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah sampai titik darah penghabisan.

## 2. Era Kolonial/VOC

Karakteristik dominan dari era ini adalah terjadinya eksploitasi<sup>2</sup> segala sumberdaya alam dan manusia oleh kaum kolonial<sup>3</sup>. Misi yang dijalankan oleh penjajah adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari tanah jajahan. Bentuk eksploitasi sumberdaya alam adalah hasil kerja dari rakyat Indonesia yang dipekerjakan oleh penjajah menjadi hak milik penjajah, dan yang dimaksud dengan eksploitasi sumberdaya manusia oleh kaum kolonial mempekerjakan rakyat Indonesia dengan tidak memberikan imbalan yang setimpal dengan pekerjaannya dan bahkan ada yang tidak diberi imbalan. Penjajah memberikan batas gerak masyarakat dalam hal pendidikan, tidak boleh sekolah kecuali anak ningrat.

Sementara meskipun begitu kondisinya semangat rakyat untuk melawan penjajah terus berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan semangat belajar mereka untuk mempelajari agama Islam di pesantren-pesantren dengan harapan bahwa melalui wawasan pendidikan yang luas akan mampu bertahan bahkan berjuang melawan penajajah, meskipun ruang gerak mereka dibatasi oleh penjajah.

## 3. Era Politik Etis

Pada era ini<sup>4</sup>, tumbuh era etis-moral pada penjajah untuk tidak sepe-

<sup>2</sup> Exploitation berasal dari bahasa Inggris yang berarti bahwa politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan (*stanford Encyclopedia of Philosophy entry on exploitation*). “Dunia ini penuh dengan manusia yang kelaparan yang tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, ini adalah sebuah paradok, di dunia negara miskin adalah dunia yang selalu lapar, mungkin terdapat cara memperluas produksi makanan yang dapat menjaga agar harga pangan menjadi tidak terlalu mahal agar mereka bisa membeli dan mendapatkan makanan. Ini adalah filosofi yang tidak berdasarkan kebijakan yang adil dan harus diberhentikan sebagai dasar aturan dalam hubungan antar bangsa-bangsa.....” (“On Development” Speech delivered by Che Guevara at the plenary session of the United Nations Conference on trade and Development in Geneva, Switzerland on March 25, 1964)

<sup>3</sup> Soegarda Poerbakawaja, *Pendidikan dalam alam Indonesia merdeka*, (Djakarta: Gunung Agung), hlm. 22.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan. *Pendidikan di Indonesia*, hlm. 107.

nuhnya mengeksploitasi masyarakat yang dijajah. Mereka membuka sekolah dokter Jawa, sekolah kerani, dan lain-lain. Mereka juga memperhatikan pendidikan kaum pribumi, terutama dari golongan priyayi elit. Pada saat yang sama, kaum terpelajar yang telah memperoleh pendidikan bergabung dalam gerakan untuk membangun cita-cita, semangat patriotisme dan perlawanan bersenjata terhadap penjajah Belanda terus berlangsung. Salah satu contoh yang paling nyata adalah Perang Aceh yang baru berakhir pada tahun 1912.

Selama era pertama hingga ketiga tersebut, sejarah membuktikan bahwa patriotisme untuk mempertahankan kemandirian dan menolak penjajahan terus berlangsung di banyak daerah Indonesia. Dengan konsep keunggulan yang dikenal sekarang, konsep *national dignity* (harkat nasional) serta konsep *national pride* (martabat nasional), Filosofinya adalah mempertahankan kemandirian, visinya adalah harkat dan martabat “bangsa” dan misinya adalah mengembangkan kemampuan sendiri.

#### 4. Era perjuangan kemerdekaan

Era 1908-1945<sup>5</sup> dapat disebut juga sebagai “*era perjuangan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional*” yaitu memperjuangkan berdirinya Negara kebangsaan. Predikat perjuangan politik yang diberikan kepada periode 1908-1945 didasari bukti-bukti sejarah berupa berkembangnya nasionalisme yang berangkat dari kesamaan komitmen patriotik untuk mempertahankan kemandirian dan kebebasan. Patriotisme lokal pada era sebelumnya. Mulai 1908, dikalangan rakyat Indonesia yang terdiri atas beribu etnik dan beribu bahasa daerah tumbuh perasaan yang sama sebagai pribumi yang terjajah. Mereka bercita-cita untuk mengusir penjajah, kemudian mendirikan sebuah Negara kebangsaan. Cita-cita ini mengalahkan sentiment kedaurahan *Jong Sumatra, Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes dan lain-lain*.

#### 5. Era Orde Baru

Koalisi *vested* mengembangkan lebih lanjut kepatuhan patrimonial ke daerah-daerah. Pemimpin-pemimpin di daerah dibawa serta untuk berkolaborasi dengan iming-iming berbagai fasilitas agar mereka patuh kepada pemimpin daerah, dan bersama dengan pemerintah pusat mereka berkoalisi memandulkan kemampuan rakyat dalam merealisasikan hak-hak politik,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 137

ekonomi dan sosial budaya. Pada akhir era ini<sup>6</sup> terjadi krisis ekonomi yang kemudian melahirkan gerakan reformasi pada 1998.

### C. Reformasi Pendidikan

Dewasa ini ada tiga persoalan pendidikan yang dibahas dan dikaji masyarakat dalam rangka reformasi yang sedang berjalan sekarang ini. Ketiga persoalan itu adalah: (1) penghapusan uang sekolah dan biaya-biaya pendidikan yang lain, (2) Perombakan total kurikulum nasional '94 dan (3) penghapusan sistem EBANAS (Evaluasi Tahap Akhir Nasional) atau namanya Ujian Nasional (UN) yang sekarang ini.

#### 1. Biaya pendidikan

Keputusan tentang uang sekolah datang dari Menteri P&K. namun, masyarakat merasa bahwa langkah-langkah yang ditetapkan pemerintah ini belum cukup untuk meringankan beban finansial yang harus mereka pikul untuk mempertahankan putra-putri mereka di sekolah. Jadi, untuk mencegah terjadinya peristiwa putus sekolah secara besar-besaran, masyarakat mengusulkan agar biaya-biaya pungutan pendidikan lainnya juga ditinjau kembali. Persoalan yang kemudian timbul adalah “lalu siapa yang harus turut memikul biaya pendidikan.”

Pertanyaan ini muncul karena kita semua sadar bahwa tidak ada pendidikan yang gratis. Selalu ada yang harus memikul biaya pendidikan itu. Dalam keadaan normal, kalau pemerintah memutuskan adanya wajib belajar, maka pemerintahlah yang harus memikul bagian terbesar dari biaya pendidikan itu. Akan tetapi dalam keadaan pemerintah hampir bangkrut seperti sekarang ini, ketentuan ini tidak mungkin dilaksanakan. Karena tidak ada keputusan maka akhirnya gejala putus sekolah secara besar-besaran itu tidak dapat dicegah<sup>7</sup>.

#### 2. Kurikulum Nasional '94

Seruan agar Kurikulum Nasional '94 – lain di singkat dengan “Kur-Nas'94” – diubah dengan segera, datang dari masyarakat. Masyarakat sudah lama tidak puas terhadap kurikulum ini. Akan tetapi, pihak birokrasi pen-

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 142

<sup>7</sup> Sindhunata (Pengt), *Pendidikan Antisipatoris*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 58

didikan selalu bersikukuh, bahwa kurikulum inilah yang benar-benar sesuai dengan tuntutan zaman. Ketika kritik dari masyarakat terhadap kurikulum ini tidak juga reda, bahkan makin lama makin deras, birokrasi pendidikan mulai menjadi gamang juga. Lalu mereka menyetujui tuntutan masyarakat dengan catatan bahwa perombakan sistem itu tidak dapat dilakukan secara total.

Jadi telah terjadi suatu salah pengertian (*misunderstanding*) antara masyarakat dengan birokrasi mengenai kurikulum '94 pada dasarnya ialah bahwa kurikulum '94 ini selain terlalu banyak materi yang tidak perlu bagi masa depan anak-anak, juga kurang mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan sebenarnya di masa depan, yaitu kehidupan dalam zaman globalisasi.<sup>8</sup>

### 3. EBTANAS

Keluhan masyarakat ialah bahwa dengan sistem EBTANAS atau UN yang berlaku selama ini, anak-anak hanya dilatih untuk mengejar angka NEM yang tinggi. Akibatnya mata pelajaran yang tidak diEBTANASKan atau di UN kan dan dengan demikian tidak akan mempengaruhi NEM. Anak-anak diabaikan sama sekali oleh para siswa dan guru.

Yang kemudian lahir di masyarakat ialah pandangan yang keliru, NEM yang sebenarnya adalah akibat dari kemampuan belajar oleh banyak anggota masyarakat dan guru di pandang sebagai sesuatu yang terlepas sama sekali dari kemampuan belajar belajar para siswa ini. Ketika para siswa ini memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi tetapi pasti, mereka lalu menjadi orang-orang yang ketinggalan zaman<sup>9</sup>.

### D. Benih Reformasi Pendidikan

Reformasi pendidikan baru dapat dikatakan terjadi setelah dilakukan langkah-langkah nyata untuk memperbaiki segenap kekurangan dan cela yang terdapat dalam sistem pendidikan. Selama yang terjadi masih pertukaran pandangan berlaku, selama itu pula reformasi pendidikan belum benar-benar terjadi. Berbagai "gejolak-gejolak" yang terjadi dalam masyarakat kita akhir-akhir ini sekedar merupakan benih reformasi pendidikan. Benih-benih itu harus terus dipupuk secara terus menerus untuk menumbuhkan reformasi pendidikan yang sebenarnya.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 59

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 60

Setelah ketiga gejolak pendidikan di atas nanti menghasilkan tindakan-tindakan nyata, dapatkah kita berkata bahwa reformasi pendidikan telah benar-benar menggelinding?

Hal tersebut bergantung pada rangkaian proses yang akan dilahirkan oleh ketiga jenis tindakan untuk menyelesaikan ketiga jenis persoalan yang telah disebutkan di atas, yaitu:

- Upaya untuk mengatur kembali cara membiayai kegiatan pendidikan.
- Upaya untuk menyusun kurikulum nasional yang lebih relevan dan lebih realistik.
- Upaya untuk mengembangkan sistem evaluasi yang lebih memadai dari pada sistem EBANAS dan UN.

Ketiga langkah tersebut bisa melahirkan langkah-langkah reformasi yang lebih mendalam lagi. Kalau yang pertama terjadi, maka kita perdebatkan selama ini memang benar-benar merupakan benih reformasi. Akan tetapi kalau ketiga usaha perbaikan nanti berhenti sampai disitu saja, maka yang akan kita jumpai pada akhirnya bukanlah reformasi, melainkan sekedar “reformasi basa-basi”. Kita belum dapat berkata bahwa kita telah melakukan reformasi pendidikan yang bersifat mendasar. Paling-paling kita akan dapat berkata bahwa telah terjadi reformasi parsial dalam system pendidikan kita.<sup>10</sup>

## **E. Hakekat Reformasi Pendidikan**

Kalau kita mau melihat keadaan dunia pendidikan kita secara jujur dan berani, maka kita akan melihat suatu tragedi dalam pelajaran sistem pendidikan kita. Kita akan melihat suatu sistem pendidikan yang sedikit telah kehilangan wawasan profesionalnya dan kehilangan pula semangat patriotismenya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kita akan melihat degradasi dari suatu sistem pendidikan.

Kita pernah memiliki sistem pendidikan yang dapat dibanggakan dalam zaman kolonial dahulu, kita telah berhasil melahirkan suatu sistem pendidikan yang memiliki nasionalisme dan patriotisme yang sangat tinggi. Dalam zaman pendidikan Jepang, sistem pendidikan kita memperlihatkan suatu ketahanan yang sangat tinggi. Watak nasionalistik, patriotik dan pengabdian ini tetap diperlihatkan oleh sistem pendidikan kita sampai akhir tahun’50-an. Akan tetapi sejak tahun 1960 sedikit demi sedikit sistem pendidikan kita

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 61

memperlihatkan kelesuan. Sistem pendidikan kita tidak memahami gejala sosio-kultural yang terjadi di sekitarnya.

Jadi kalau sekarang ini ingin melakukan reformasi pendidikan yang benar-benar mendasar, maka kita harus melakukan perubahan-perubahan yang dapat mengembalikan profesional yang telah hilang tadi. Kita harus melakukan perubahan-perubahan yang dapat mengembalikan semangat patriotisme kepada sistem pendidikan kita memahami proses sosio kultural yang sedang berlangsung dalam masyarakat kita.

Kita harus melakukan perubahan-perubahan yang dapat menychatkan sistem pendidikan kita dari penyakit naivitas politik (*political naivety*).

Tindakan-tindakan yang dapat melahirkan perubahan-perubahan adalah harus meninjau sistem pendidikan secara:

### **1. Internal**

Ditinjau secara internal, reformasi pendidikan baru dapat dikatakan benar-benar terjadi kalau kita telah melakukan langkah-langkah nyata untuk mengembalikan fungsi-fungsi pendidikan sepenuhnya kepada sekolah-sekolah kita

Dunia pendidikan kita mengalami kebekuan. Tidak ada gerakan-gerakan baru yang mendobrak segenap kondisi yang kita rasakan menyesakkan; tidak ada pandangan-pandangan baru yang segar, yang mampu mendorong kita mencari alternative terhadap sistem yang kita rasa mengecewakan ini; tidak pula ada kekuatan yang berani mengingatkan kita pernah memiliki sistem pendidikan yang dapat di banggakan.<sup>11</sup>

Jadi ditinjau secara internal, reformasi pendidikan yang mendasar adalah reformasi yang mampu mengembalikan otonomi pedagogis kepada sekolah dan guru. Reformasi seperti ini menuntut peninjauan ulang terhadap seluruh ketentuan yang ada mengenai hubungan antara birokrasi pendidikan, pada satu pihak, dengan sekolah dan para guru, pada pihak yang lain. Perlu diingat dalam hubungan ini, bahwa yang sehari-hari membimbing para siswa di sekolah adalah para guru. Berdasarkan pembagian tugas seperti ini, perbaikan nyata di sekolah-sekolah sangat ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh para guru di sekolah masing-masing, dan tidak oleh apa yang dilakukan oleh para administrator pendidikan dalam birokrasi mereka. Jadi, pada dasarnya, hanya apabila birokrasi pendidikan, menaruh kepercayaan yang penuh

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 63



terhadap sekolah dan guru akan tercipta suasana kerja yang penuh dari birokrasi pendidikan, sekolah dalam pandangan masyarakat akan tampak sebagai lembaga yang benar-benar bermartabat. Dengan pulihnya martabat ini, akan menjadi mungkin bagi sekolah dan guru untuk bertindak dengan penuh wibawa dan percaya diri.

Reformasi pendidikan yang berarti dalam keadaan kita sekarang ini sangat bergantung kepada sikap dan tindakan birokrasi pendidikan. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat, terutama pada orang tua dan para guru ialah mengemukakan dengan jelas segala sesuatu yang mereka rasakan tidak benar dalam kehidupan sekolah sekarang ini dan mengemukakan dengan jelas segala sesuatu yang mereka rasakan tidak benar dalam kehidupan sekolah sekarang ini dan mengemukakan dengan jelas perubahan-perubahan yang ingin mereka lihat terjadi disekolah. Misalnya saja perubahan-perubahan mengenai bagaimana sekolah membimbing putra-putri mereka mengembangkan bakat-bakat khusus mereka masing-masing.

## 2. Eksternal

Apa yang harus dilakukan untuk membuat sistem pendidikan menjadi bagian integral dari reformasi ekonomi, politik, hukum dan reformasi-reformasi lain yang kita harapkan akan terjadi dalam masyarakat kita.<sup>12</sup>

### a. Reformasi Ekonomi

Reformasi ekonomi bertitik tolak dari keadaan yang terpuruk yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 1998 sekitar -14% inflasi yang bergerak dengan cepat, suku bunga yang tinggi dan keadaan perbankan yang kurang mendukung, tanggapan luar negeri yang besar dan cadangan devisa yang terbatas. Oleh karena itu reformasi ekonomi dirumuskan sebagai upaya untuk mengembangkan kehidupan ekonomi yang bersifat terbuka dan adil, mengutamakan meritokrasi dan penyalahgunaan koneksi, serta mengupayakan timbulnya kehidupan ekonomi yang bebas dari korupsi. Lalu apa yang terjadi dengan sekolah kita untuk membuatnya menjadi bagian dari reformasi itu.

Ada tiga hal yang harus dilakukan guru-guru di sekolah, yaitu: (1) mendidik para siswa untuk menjauhi segenap praktek yang bersifat curang, (2) mengajarkan untuk mengetahui kemampuan nilai ekonomis dari segenap pengetahuan dan ketrampilan yang mereka kuasai dan (3) membiasakan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 65

para siswa untuk bersifat terbuka bersedia dikontrol dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok. Yang terakhir ini merupakan sifat yang seharusnya telah terbentuk melalui pendidikan demokrasi. Dan langkah-langkah seperti ini, sekolah akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses reformasi ekonomi yang berjalan di masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. *Reformasi Politik*

Reformasi politik adalah upaya berkelanjutan untuk menciptakan sistem politik yang demokratis yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal lainnya.<sup>14</sup> Lalu apa yang harus dilakukan untuk membuat mampu mengajarkan demokrasi kepada siswa. Kalau sekolah-sekolah berhasil menanamkan dalam diri para siswa kecintaan yang cukup dalam terhadap demokrasi, maka masyarakat kita makin lama akan menjadi makin demokratis.

Yang harus dilakukan dalam pendidikan ialah menuai perubahan kurikulum, tetapi mendorong guru-guru kita untuk bersikap demokratis terhadap murid-murid dan tidak dapat dilakukan dengan gebrakan. Ini hanya dapat terjadi atas dasar kesadaran guru-guru.

Pada prinsipnya yang harus terjadi di sekolah-sekolah kita ialah adanya suatu kurikulum yang akan melahirkan berbagai kegiatan pendidikan untuk menentukan para siswa memahami dan menerima nilai-nilai demokrasi. Ini meliputi antara lain:

- Kegiatan membentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat
- Latihan-latihan untuk mengembangkan kemampuan menyatakan pendapat secara sopan dan jelas.
- Latihan- latihan untuk membentuk kemampuan mengambil keputusan bersama mengenai masalah-masalah yang menyentuh kepentingan bersama.<sup>15</sup>

## 3. *Reformasi Hukum*

Hukum adalah seluruh kaidah serta asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dengan tujuan untuk memelihara keterli-

---

<sup>13</sup> Fasli Jalal, Dedi Supriadi (Ed.), *Reformasi Pendidikan dalam konteks otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa. 2001), hlm. 56.

<sup>14</sup> Sindhunata, *Pendidikan...*, hlm. 66.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 65

batan dan keteraturan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup> Reformasi di bidang hukum mempunyai dua aspek: (1) mengadakan perubahan terhadap sejumlah instrument hukum yang sekarang ini berlaku dalam masyarakat kita dan (2) membuat seluruh lapisan masyarakat menghormati dan menaati segenap hukum yang berlaku.

Dilihat dari sudut pendidikan, masalah pembinaan sikap menaati hukum pada dasarnya adalah masalah mengajarkan ketaatan terhadap norma-norma. Hukum adalah salah satu norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk membimbing para siswa tumbuh menjadi manusia demokratis (internalisasi) nilai-nilai demokrasi. Akhirnya, untuk membimbing para siswa menjadi manusia yang ta'at kepada hukum sebagai suatu norma, yang dibutuhkan ialah bimbingan pendidikan yang membawa anak kepada pengikatan diri secara sukarela (*voluntary personal commitment*) terhadap nilai-nilai yang diyakininya.<sup>17</sup>

## F. Penutup

Reformasi pendidikan merupakan suatu pembaharuan pendidikan yang ada kaitannya dengan reformasi di bidang-bidang lain seperti ekonomi, politik, hukum, budaya dan lain sebagainya.

Reformasi pendidikan khususnya di Indonesia bisa dikatakan sebagai tuntutan sejarah. Hal itu dikarenakan, Indonesia pada masa silam mengenai pendidikan pernah menjadi suatu kebanggaan. Datangnya penjajahan ke Negara Indonesia ada untungnya juga. Dan dalam perjalanan pendidikan setelah merdeka kira-kira tahun 1960-an pendidikan mengalami keterbelakangan yang menyebabkan Negara Indonesia terpuruk diantara Negara-negara yang lain. Oleh karena itu dengan munculnya reformasi pendidikan ini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia bahwa dulu pernah menjadi suatu kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Amin

---

<sup>16</sup> Fasli, *Reformasi...*, hlm. 57

<sup>17</sup> Sindhunata, *Pendidikan....* Hlm. 68

## DAFTAR PUSTAKA

- Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1980
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia dari jaman kejaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Fasli Jalal, Dedi Supriadi (Ed.), *Reformasi Pendidikan dalam konteks otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa. 2001.
- Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1995
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikhul Islamiyah al Siyasi wa al Din wa al Tsaqofi wa al Ijtima'i*, Mesir: Dar al Maktabah al Nahdliyah, 1967
- Ivor Morrish (Ed.) *Aspect of Educational Change*, London: George Allen&Unwin, 1978
- Onny S. Prijono, A.M.W. Pranarka, *Situasi Pendidikan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir*, Bagian I (permasalahan), Jakarta: Yayasan Proklamasi center for strategic and international studies, 1979.
- Samsul Nizar, (Edt.) *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.II 2008
- Sindhunata (Pengt), *Pendidikan Antisipatoris*, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam alam Indonesia merdeka*, Djakarta: Gunung Agung.
- Suwito, Fauzan, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Tim Penyusun Ditbinperta, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Ditbinperta, 1986